

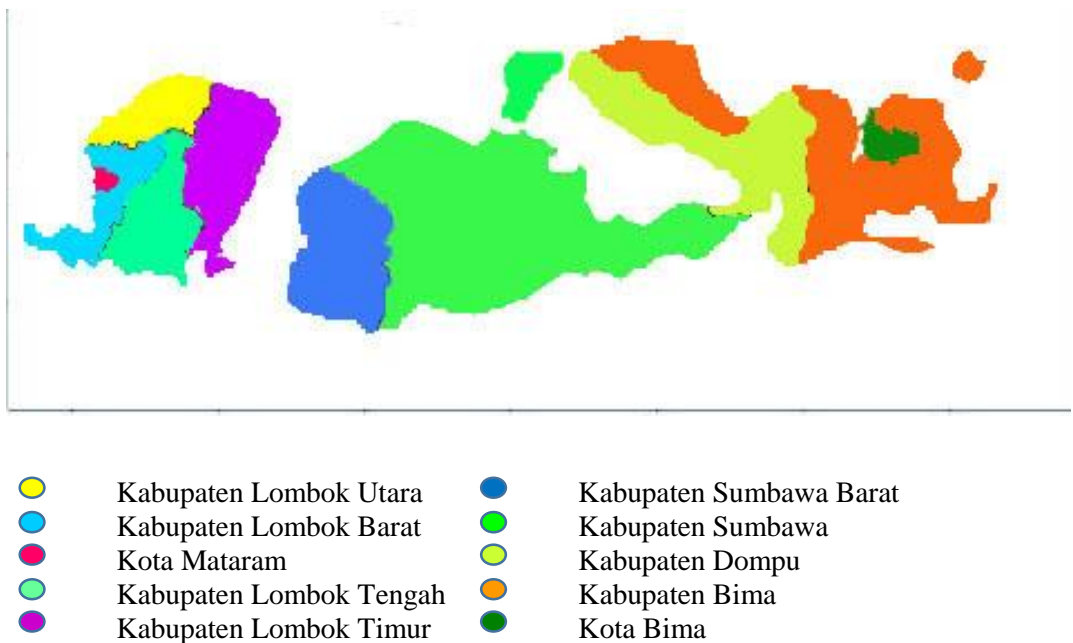
BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

IV.1 Wilayah Administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu dari sekian banyak provinsi/daerah di Indonesia dengan ratusan pulau, dari 279 pulau hanya ada 2 (dua) pulau besar yakni Pulau Lombok dan Sumbawa yang menjadi pusat administrasi pemerintah. Terdapat masing-masing 5 (lima) kabupaten/kota antara pulau Lombok dan Sumbawa, dengan ibu kota provinsi terletak di Pulau Lombok atau lebih tepatnya di Kota Mataram¹.

Gambar 4.1 Peta Administrasi Provinsi NTB



¹ Lihat Nusa Tenggara Barat Dalam Data 2015. Hasil Kerjasama BAPPEDA dengan BPS NTB. hal 3. pdf

Gambar di atas menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara kedua pula (Lombok dan Sumbawa), perbedaan tersebut antara lain dari segi luas, dimana 15.414,5 km² atau 76,49 % merupakan luas dari Pulau Sumbawa, yang artinya luas Pulau Lombok hanya 4.738.65 km² atau 23,51% dari total luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Lombok dan Sumbawa sama-sama memiliki 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota, sedangkan jumlah Kecamatan masih didominasi oleh kabupaten/kota di Pulau Sumbawa yakni 63 (enam puluh tiga) Kecamatan, jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah Kecamatan di 5 (lima) kabupaten/kota di Pulau Lombok yakni 53 (lima puluh tiga) Kecamatan. Luas wilayah dan jumlah Kecamatan yang disebutkan di atas berbanding terbalik dengan jumlah Desa/Kelurahan yang ada, dimana terdapat 543 Desa/Kelurahan di Pulau Sumbawa dan 598 Desa/Kelurahan di Pulau Lombok².

IV.2 Geografis

Letak geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada 115° 46' - 199° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9° 5' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut ;

Sebelah Utara	: Laut Jawa dan Laut Flores
Sebelah Selatan	: Samudra Hindia
Sebelah Barat	: Provinsi Bali
Sebelah Timur	: Provinsi NTT

² Ibid hal 3-37

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar terdiri dari daratan tinggi dengan ketintingian masing-masing kabupaten/kota dari permukaan air laut antara belasan hingga ratusan meter. Taliwang sebagai Ibu Kota Kabupaten Sumbawa Barat menjadi daerah terendah dengan ketinggian 11 (sebelas) meter, sementara Kota Selong Kabupaten Lombok Timur sebagai daerah tertinggi berada pada ketinggian 166 meter, dan Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan ketinggian 107 meter sebagai daerah tertinggi kedua. Tinggi ibu kota masing-masing kabupaten/kota dari permukaan air laut terdapat pada tabel 4.1 di bawah.

Tabel 4.1 Tinggi Ibu Kota Kabupaten/Kota dari Permukaan Air Laut

Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Tinggi
Lombok Utara	Tanjung	12
Lombok Barat	Gerung	15
Kota Mataram	Mataram	27
Lombok Tengah	Praya	107
Lombok Timur	Selong	166
Sumbawa Barat	Taliwang	11
Sumbawa	Sumbawa Besar	18
Dompu	Dompu	30
Bima	Raba	21
Kota Bima	Raba	21

Source : Nusa Tenggara Barat Dalam Data 2015

IV.3 Demografis

Pada tahun 2014 jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai angka 4.773.795 jiwa, dengan perbandingan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.315.234 jiwa dan perempuan sebanyak 2.458.561 jiwa, sedangkan menurut rincian kelompok umur terbanyak berada pada 0-4 tahun yakni 508.569 dan terendah 60-64 tahun sebanyak 129.588 jiwa³.

IV.3.1 Tenaga Kerja

Sensusnas mencatat 127.710 orang Penduduk NTB pada tahun 2014 sebagai pencari kerja, kurang dari setengah jumlah tersebut atau sebanyak 52.403 orang di antaranya telah mendapatkan pekerjaan. Pada tahun yang sama total penduduk NTB yang bekerja berjumlah 2.094.100 orang, namun yang perlu menjadi catatan ialah Nusa Tenggara Barat juga merupakan salah satu provinsi dengan jumlah TKI (Tenaga Kerja Indonesia), terdapat sekitar 46.187 orang yang terdaftar secara resmi berkerja di luar negeri. Malaysia merupakan negara tujuan tenaga kerja indonesia asal NTB yang paling banyak dengan jumlah 37.398 orang, tujuan terbanyak kedua adalah Oman dengan jumlah 4.668 orang⁴.

³ Op. Cit. Hal 71

⁴ Ibid

IV.3.2 Kemiskinan

Berdasarkan data yang diperoleh, dalam rentang waktu sepuluh tahun yakni antara tahun 2005 hingga 2014 Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil menekan angka penduduk miskin secara kontinu. Penurunan angka kemiskinan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2009 dengan persentase hingga 4,39% dari angka 27,17% pada tahun 2008 menjadi hanya 22,78% sedangkan pada tahun-tahun berikutnya penurunan angka kemiskinan hanya dikisaran angka satu persen.

IV.4 Pembangunan Wilayah Pedesaan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan selama kurun waktu tidak kurang dari 3 (tiga) bulan yakni antara Bulan April-Juni 2018. Pengumpulan data dan informasi meliputi 2 (dua) tahap atau 2 (dua) tingkat yakni, tahap awal dimulai dari tingkat provinsi yang meliputi dokumen-dokumen perencanaan seperti RKPD, RPJMD dan RTRW yang diperoleh dari Bappeda Provinsi NTB. Pengumpulan data tingkat provinsi ini dianggap perlu guna mendapatkan peta pembangunan di Provinsi NTB, khususnya yang berkaitan langsung dengan pembangunan kawasan pedesaan.

Pada tahap awal diperoleh gambaran secara umum tentang prioritas pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RKPD, RPJMD, dan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menunjukkan masih bertumpunya program dan kebijakan pada sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan,

peternakan, dan perikanan, serta pariwisata. Sektor pariwisata memang menjadi salah satu daya tarik bagi investasi yang masuk ke Provinsi NTB mengingat jumlah kunjungan wisatawan per tahun 2015 mencapai angka lebih dari 2.210.527 pengunjung, bahkan dengan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang direncanakan rampung pembangunannya pada tahun ini, pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan hingga 5 (lima) juta kunjungan pada tahun 2019.

Provinsi Nusa Tenggara Barat selain memiliki alam yang bagus dengan berbagai destinasi wisatanya untuk ditawarkan bagi wisatawan baik dalam dan luar negeri, alam yang dimiliki provinsi ini juga berpotensi untuk menghasilkan komoditas-komoditas unggulan, seperti perkebunan antara lain kopi yang mencapai angka produksi 4.817,9 ton, kelapa 54.977,5 ton, dan kakao 1.794,0 ton, serta komoditas pertanian seperti kacang tanah sebanyak 34.284 ton dan kedelai 97,172 ton⁵.

Mengangkat tema pembangunan “*Melawan Kemiskinan Dari Desa*” sebagai framing dalam penanggulangan permasalahan daerah terutama kemiskinan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan signal yang cukup kuat atas penelitian ini, artinya ada relevansi antara judul dan permasalahan yang ingin dieksplorasi dalam penelitian dengan tema pembangunan di daerah tersebut. Menurut data yang diperoleh terdapat

⁵ Op. Cit, hal 267-317

beberapa program Pemerintah Provinsi yang langsung bersentuhan dengan Desa atau masyarakat di antaranya program penanggulangan kemiskinan dengan lima program turunannya yaitu, perbaikan terhadap RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), sambunga listrik murah, penyediaan akses air bersih, dan pembuatan jamban serta bantuan biaya pendidikan. Program penanggulangan kemiskinan juga dilakukan dengan memetakan Desa-Desa yang menjadi kantong-kantong kemiskinan, sehingga didapatkan 100 (seratus) Desa miskin, dimana dari hasil pemetaan, 50 di antaranya sedang dalam program-program penanggulangan kemiskinan. Program pembangunan Desa dari pemerintah provinsi lainnya yang saat ini dalam tahap pelaksanaan antara lain program OVOP (One Village One Product), dan pembentukan 50 (limapuluh) Desa wisata dan komunitas kampung online.

Pembangunan kawasan perdesaan sendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas lima unsur utama yakni; i) penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, ii) pembangunan pusat pertumbuhan antar Desa secara terpadu, iii) penguatan kapasitas masyarakat, iv) kelembagaan dan kemitraan ekonomi, dan v) pembangunan infrastruktur antar-perdesaan. Peraturan tersebut pada pasal 124 ayat (1) juga menjelaskan bahwa pelaksanaan dan

penetapan atas lokasi pembangunan kawasan perdesaan lebih jauh dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, sehingga bupati/walikota perlu menetapkan wilayah-wilayah yang dianggap potensial di daerahnya sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan yang strategis.

IV.4.1 Mitra Pembangunan Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pelaksanaan Musrembang RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2019 pada Tanggal 16 April 2018 selain membahas tentang kelima prioritas pembangunan daerah juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan atas partisipasi berbagai pihak dalam program pembangunan di NTB. Terdapat sekitar 15 (limabelas) mitra pembangunan daerah yang menerima piagam tersebut dari Gubernur NTB di antaranya, Plan International atas partisipasi dan kemitraannya dalam program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM); Yayasan Masyarakat Peduli yang berpartisipasi dalam percepatan terhadap akses air bersih/air minum, sanitasi dan penyehatan lingkungan; Islamic Relief dengan partisipasinya terhadap pengentasan kemiskinan dan kebencanaan; dan WALHI yang berpartisipasi dalam menjaga lingkungan hidup di NTB, serta beberapa mitra lain seperti KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) yang merupakan kerjasama antara Australian-Indonesia dalam peningkatan layanan dasar, seperti halnya AIP (Australian Indonesia Partnership) dengan program

PRISMA-nya, dan juga GIZ-ISED yang merupakan kerjasama antara Indonesia dengan Jerman dalam pengembangan KEK Mandalika.

Tahap selanjutnya ialah pengumpulan data dan informasi di tingkat kabupaten yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Kebutuhan data dari kabupaten antara lain RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kabupaten dan dokumen RPKP (Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan) pada ketiga kabupaten.

Data yang diperoleh pada tahap kedua atau di tingkat kabupaten lebih spesifik dari pada tingkat provinsi, karena diperoleh dokumen yang secara khusus memuat tentang program pembangunan kawasan perdesaan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP). Substansialnya materi rencana pembangunan kawasan perdesaan yang berdasarkan Permendes nomor 5 tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan, pada pasal 7 setidaknya harus memuat beberapa hal di antaranya;

- a) Isu-isu strategi pada kawasan perDesaaan yang telah ditetapkan
- b) Tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan
- c) Arah kebijakan pembangunan dan Strategi pembangunan kawasan perdesaan
- d) Program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan
- e) kebutuhan Pendanaan pembangunan kawasan perdesaan, dan

f) Indikator capaian pembangunan kawasan perdesaan

Penyusunan RPKP dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) yang terdiri dari beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait serta dibantu dan didampingi oleh pihak ketiga yang berasal dari luar pemerintah seperti perguruan tinggi dan konsultan atau lembaga swadaya masyarakat.

IV.4.2 Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Lombok Barat

Lombok Barat merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Provinsi NTB, tercatat sekitar 644.586 jiwa atau 13.5% dari total Penduduk NTB bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 1.053,92 km², yang terbagi atas 10 (sepuluh) Kecamatan, 199 Desa dan 3 (tiga) Kelurahan di bawah wilayah administratifnya. Banyaknya jumlah Desa yang ditunjukkan data tersebut secara langsung mampu memberikan gambaran bahwa sebagian besar penduduk Lombok Barat berdomisili di wilayah perdesaan⁶.

Tingginya jumlah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah perdesaan dan minimnya ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Lombok Barat tentu menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah, dimana dalam model perhitungan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dengan SNA 2008 (System of National Accounts) berdasarkan pendekatan

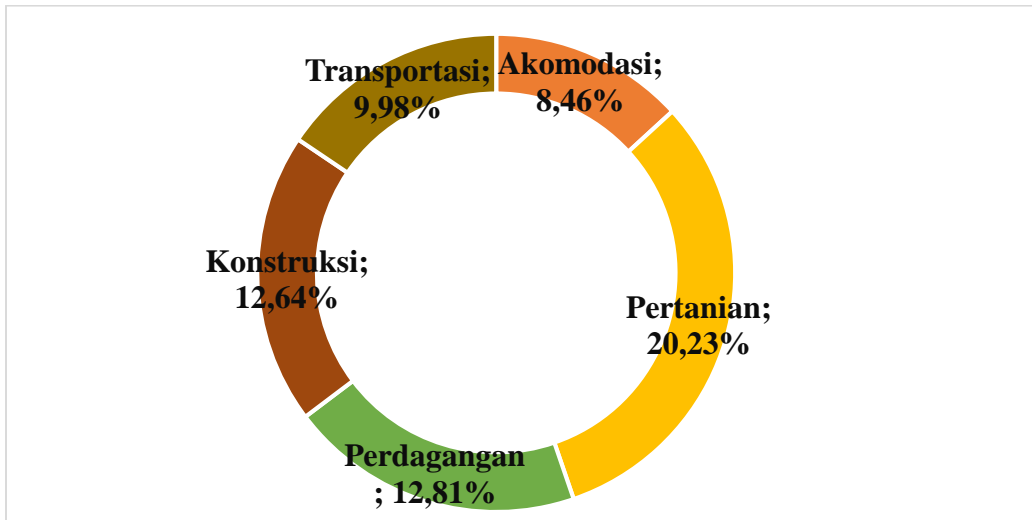
⁶ Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Lombok Barat 2017-2022

produksi yang menggunakan 17 (tujuhbelas) unit lapangan usaha sebagai indikator, data Kabupaten Lombok Barat menunjukkan bahwa hanya bertumpu pada sekitar 5 (lima) lapangan usaha utama, yakni; pertanian, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan akomodasi. Terbatasnya lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja serta terkonsentrasinya lapangan usaha di kota dan beberapa titik, tentunya hal tersebut berdampak terhadap kesenjangan wilayah yang kemudian memberikan dampak yang tidak baik bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Sektor pertanian di Lombok Barat mengalami trend yang cukup positif, salah satunya dengan terjadinya peningkatan terhadap Nilai Tukar Petani (NTP), dimana pada tahun 2014 NTP tercatat berada pada nilai 102.25 dan mengalami kenaikan atau surplus, artinya ada peningkatan terhadap kesejahteraan petani, sayangnya hal tersebut belum mampu menekan angka kemiskinan yang terbilang tinggi di Kabupaten Lombok Barat. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Barat mencatat angka kemiskinan per tahun 2015 sebesar 17,11%. Pada tahun yang sama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Lombok Barat juga menunjukkan bahwa wilayah perdesaan yang merupakan pusat kegiatan pertanian masih menjadi penyumbang angka kemiskinan terbanyak, dimana 5 dari 10 Kecamatan yang ada yakni, Lingsar, Gunungsari, Narmada, Lembar, dan Gerung, masih terdapat sebanyak 12.309 rumah

tangga miskin, sehingga di butuhkan program dan strategi pembangunan yang lebih tepat kedepannya terutama dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Grafik 4.1
Lapangan Usaha Dominan dalam Struktur Perekonomian
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015



Source: SPKP Kabupaten Lombok Barat 2017-2022

Menghadapi permasalahan seperti apa yang tergambar dari data-data di atas, terutama masalah kemiskinan memang bukan saja dialami oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lombok Barat, bahkan pememerintah Provinsi NTB dan sebagian besar daerah lainnya di Indonesia juga masih terus berusaha untuk menekan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Upaya-upaya dalam menanggulangi masalah baik kemiskinan, rendahnya ketersediaan lapangan kerja, serta masalah lainnya tentu menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta berbagai

pihak/stakeholder, namaun dalam konteks pembangunan kawasan perdesaan Pemerintah Daerah Kabupaten harus menjadi yang paling terdepan dan paling bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ada.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Peraturan Bupati dengan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan (SPKP) tahun 2017-2022 menetapkan 2 (dua) kawasan yang disebut sebagai *Kawasan Perdesaan RAGAMADU dan Kawasan Perdesaan Pesisir*, kedua kawasan meliputi 5 Kecamatan dan 13 Desa. Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan tentunya memiliki beberapa pertimbangan khusus, termasuk potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah yang menjadi lokasi pembangunan.

Ragamadu sendiri adalah singkatan dari beberapa nama komoditas unggulan yakni *rambutan, gula aren, manggis, dan durian*. Kawasan Ragamadu terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 10 (sepuluh) Desa. Wilayah yang dimiliki Kawasan Ragamadu jauh lebih luas dibandingkan dengan Kawasan Perdesaan Pesisir. Kawasan Pesisir hanya terdiri atas 2 Kecamatan dan 3 Desa. Komoditas unggulan yang dimiliki Kawasan Perdesaan Pesisir tentunya bersumber dari potensi laut di wilayah tersebut, hasil produksi Kawasan Pesisir Lombok Barat antara lain; *rumput laut, tongkol, dan udang rebon*.

Kondisi Desa yang ada dalam Kawasan Perdesaan Ragamadu dan Kawasan Perdesaan Pesisir berdasarkan indeks pembangunannya kebanyakan bersetatus Desa berkembang, akan tetapi masih dijumpai adanya Desa yang bersetatus sebagai Desa tertinggal, namun ada juga yang bersetatus Desa maju. Status masing-masing Desa dapat diketahui dari tingkat pembangunannya berdasarkan model Indeks Desa Membangun (IDM).

Pada Peraturan Menteri PDPTT Nomor 2 Tahun 2016 pada bab iii pasal 3 ayat 1 sampai 4 berbunyi komponen Indeks Desa Membangun (IDM) terdiri atas 3 (tiga) komponen, pertama Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang berdimensikan modal sosial, kesehatan, pendidikan, dan permukiman. kedua Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang terdiri dari satu dimensi yaitu ekonomi., dan ketiga Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang juga terdiri dari satu dimensi yakni ekologi. Terdapat lima kategori Desa dalam penilaian ini, yaitu; Desa sangat tertinggal dengan nilai < 0.491 ; untuk Desa tertinggal dengan nilai > 0.491 dan < 0.599 ; sementara Desa berkembang > 0.599 dan < 0.707 ; sedangkan Desa maju > 0.707 dan < 0.815 ; dan terakhir Desa mandiri, dengan nilai > 0.815 .

Model lain yang juga dapat digunakan dalam mengukur tingkat pembangunan Desa adalah Indeks Pembangunan Desa (IPD). Pengkategorian Desa sebagai Desa tertinggal berdasarkan jika suatu Desa belum mampu memenuhi 5 (lima) dimensi yakni; pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,

aksesibilitas/transfortasi, dan pelayanan umum serta penyelenggara pemerintahan. Dari kelima dimensi terdapat 12 (duabelas) variabel dan 42 (empatpuluh dua) indikator, dengan hitungan indeks nilai 0 s/d 100, dimana Desa mandiri memiliki nilai >75, Desa berkemabang >50, dan kurang dari 50 untuk Desa tertinggal, nilai yang dihasilkan kemudian menjadi indeks pembangunan Desa (IPD) untuk setiap Desa.

IV.4.3 Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Lombok Tengah

Berdampingan secara langsung antara Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat tidak serta merta membuat kedua kabupaten menyikapi permasalahan pembangunan daerah dengan strategi dan kebijakan yang sama, bahkan jika diperbandingkan tidak ada perbedaan yang sangat signifikan terhadap kedua daerah baik dari kondisi alam (potensi) bahkan sosial dan budayanya. Perbedaan strategi tentunya berimplikasi positif agar tidak terjadinya benturan kepentingan, serta diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antar daerah. Perbedaan strategi dan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan kedua kabupaten terletak pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia, jika Kabupaten Lombok Barat lebih orientasi pada komoditas dan produksi dari subpertanian dan hasil laut, sedangkan strategi pembangunan kawasan perdesaan Kabupaten Lombok Tengah lebih berorientasi pada pemanfaatan wilayah atau kawasan secara alami seperti pariwisata.

Kabupaten Lombok Tengah memang menjadi salah satu dari tujuan wisata yang cukup populer di Provinsi NTB selain Lombok Barat dan Lombok Utara. Menjadi gerbang masuk bagi wisatawan dengan keberadaan Bandara Internasional Lombok (LIA), kabupaten ini juga merupakan kawasan strategis pusat pengembangan pariwisata di NTB dengan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang direncanakan beroperasi pada tahun 2019. Kegiatan pariwisata di Lombok Tengah saat ini masih lebih banyak dilakukan di wilayah Selatan dibandingkan wilayah Utara, sehingga untuk menghindari kesenjangan serta terwujudnya pembangunan secara terintegrasi antar wilayah, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mendorong pembangunan kawasan ekowisata berbasis perdesaan pada 2 (dua) Kecamatan dan 9 (sembilan) Desa di wilayah Lombok Tengah bagian utara.

Konsep ekowisata menjadi pilihan dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah karena diharapkan adanya keterkaitan (linkage) ataupun koneksi (networking) baik antar wilayah dan kebijakan Pemerintah Daerah serta RTRW Kabupaten yang berorientasi pada sektor pariwisata. Pengembangan ekowisata dikelompokkan dalam dua pola yakni pengembangan terhadap kawasan yang telah memiliki destinasi wisata, dan pengembangan kawasan baru. Komoditas yang ditawarkan ekowisata sendiri sebagaimana termuat dalam Masterplan Pembangunan Kawasan

Ekowisata Perdesaan Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan manusia.

Kawasan Ekowisata Perdesaan Sebagimana Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 24 Tahun 2017 di pusatkan pada Kecamatan Kopang yang terdiri dari 2 (dua) Desa yakni Desa Aik Bual dan Wajegeseng, dan Kecamatan Batu Kliang Utara yang terdiri dari 7 (tujuh) Desa yaitu Desa Teratak, Aik Berik, Aik Bukak, Setiling, Mas-Mas, Karang Sidemen, dan Desa Lantan. Ekowisata sendiri merupakan berbagai kegiatan wisata alam yang memeperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal⁷.

Masterplan Pembangunan Ekowisata Perdesaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 memang berorientasi pariwisata, akan tetapi bukan bearti mengesampingka ciri khas dari kawasan perdesaan itu sendiri yang memang syarat dan identik dengan berbagai kegiatan pertanian. Artinya konsep pembangunan ekowisata merupakan langkah strategis Pemerintah Lombok Tengah yang memadukan antara potensi wisata dengan produk atau komoditas-komoditas pertanian yang dimiliki oleh Desa-Desa yang ada di kawasan.

⁷ Masterplan Pembangunan Ekowisata Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017

IV. 4. 4 Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur adalah kabupaten dengan jumlah penduduk dan Desa terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat sekitar 1.153.773 jiwa penduduk menurut data BPS Tahun 2015, jumlah tersebut tersebar di 20 Kecamatan dan 239 Desa serta 15 Kelurahan. Berdasarkan IDM (Indeks Desa Membangun) dan IPD (Indeks Pembangunan Desa) dari 239 Desa hanya 14 Desa yang berstatus Desa maju, dan 148 dengan status berkembang, sedangkan 77 Desa lainnya masih berstatus sebagai Desa tertinggal⁸.

Tingginya jumlah Desa tertinggal di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan pembangunan di tingkat Desa di daerah tersebut masih sangat lemah atau memperhatikan, jika dengan kondisi yang demikian ketimpangan pembangunan antar Desa-Kota tentu akan menjadi semakin parah. oleh sebab itu, pemerintah terutama Pemerintah Daerah harus lebih optimal dalam memobilisasi sumber daya melalui berbagai program dan kebijakan yang berbasis Desa agar pemerataan pembangunan dapat terwujud.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terus mendorong pembangunan di tingkat Desa yang salah satunya dengan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Berdasarkan instruksi dari Kemendes

⁸ Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan TERJANG Kabupaten Lombok Timur 2017

PDDT pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menetapkan sebuah kawasan perdesaan *sentra produksi pengembangan ternak dan jagung* atau disebut TERJANG yang berlokasi di Kecamatan Aikmel yang difokus pada 6 (enam) Desa yaitu; Desa Lenek Duren, Aik Prapa, Aikmel Utara, Kembang Kerang Daya, Kembang Kerang, dan Desa Toya. Dua dari keenam Desa yang disebutkan bersetatus sebagai Desa berkembang yakni Kembang Kerang dan Kembang Kerang Daye, sedangkan empat Desa lainnya masih bersetatus Desa tertinggal.

Nama atau tema TERJANG dipilih karena ternak dan jagung merupakan potensi unggulan yang dimiliki dan dapat dikembangkan dari kawasan tersebut, seperti misalnya sapi dengan populasi sebanyak 2.200 ekor sedangkan potensialnya 10.000 ekor, kambing 14.837 ekor potensial 16.000 ekor, adapun lahan yang potensial dapat ditanami jagung sekitar 183 hingga 250 ha. Di antara keenam Desa yang ada, Desa Aikmel Utara ditetapkan sebagai Pusat Kawasan TERJANG karena beberapa pertimbangan, seperti berada dalam posisi sentral (tengah) sehingga dapat menjadi penghubung antar Desa, memiliki infrastruktur yang lebih memadai, dan adanya kelembagaan ekonomi yang sedang berkembang, serta memiliki akses yang lebih dekat dengan pasar dan kota⁹.

⁹ Ibid

Kawasan Perdesaan TERJANG sebagaimana wilayah perdesaan lainnya memang masih didominasi oleh masyarakat dengan mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, namun karena pendapatan dari hasil pertanian yang masih sangat rendah sehingga banyak dari masyarakat atau penduduk di wilayah ini lebih memilih bekerja di luar negeri sebagai buruh migran. Jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian tetap hanya sekitar 38.8% atau hanya 11.475 dari total penduduk yang berdomisili di Kawasan TERJANG dengan jumlah yang mencapai angka 29.613 jiwa, sedangkan 61.2% atau 18.138 jiwa di antaranya berarti belum atau tidak bekerja. Pembangunan Kawasan TERJANG memang diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ketertinggalan pembangunan di tingkat Desa dan keterbatasan lapangan kerja, akan tetapi pembangunan tersebut tentunya membutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat sehingga mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.